BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Krisis finansial yang terjadi di Yunani tentunya berdampak terhadap stabilitas ekonomi di negara tersebut. Sebagai negara anggota Uni Eropa dan Eurozone, krisis yang terjadi di Yunani sangat mudah untuk menjalar ke negara-negara Euro lainnya mengingat sistem ekonomi di kawasan ini terintegrasi melalui penggunaan mata uang bersama. Krisis finansial ini diakibatkan oleh adanya ketidakseimbangan fiskal di Yunani yang pada akhirnya memaksa Yunani untuk menutupi defisitnya dengan cara berutang kepada negara-negara Uni Eropa lainnya. Sayangnya, pertumbuhan ekonomi Yunani tidak stabil sehingga pada masa krisis finansial global Yunani un terkena dampak krisis. Keadaan ini semakin memperparah situasi ekonomi Yunani hingga menyebabkan Yunani harus menerima dana talangan dari Uni Eropa, ECB dan IMF. Namun, pemberian dana talangan ini pun tidak cukup untuk mengembalikan stabilitas ekonomi di negara tersebut hingga pada tahun 2015 Yunani gagal membayar utangya kepada IMF.

Yunani telah tenggelam dalam krisis finansial sejak tahun 2010. Peneliti melihat bahwa munculnya krisis ini tidak hanya diakibatkan oleh ketidakdisiplinan Yunani mengelola kebijakan fiskalnya, namun juga diakibatkan oleh ketidaktegasan Uni Eropa dan Bank Sentral Eropa dalam menindak pelanggaran fiskal yang dilakukan oleh negara anggotanya. Dampak krisis finansial yang terjadi di Yunani dan telah merambat ke beberapa negara anggota Uni Eropa lainnya tidak dapat diabaikan begitu saja. Uni Eropa sebagai organisasi supranasional tertinggi di

kawasan tersebut tentunya berperan penting dalam menanggulangi krisis finansial ini. Tidak hanya mengancam stabilitas ekonomi dan integrasi di kawasan Uni Eropa, krisis ini tentunya juga telah menjadi pertaruhan atas nama baik Uni Eropa sebagai suatu kawasan yang ideal.

Krisis ini menunjukkan masih adanya kelemahan pada sistem moneter tunggal di Uni Eropa. Selain itu, baik Uni Eropa maupun Bank Sentral Eropa belum memiliki kebijakan atau aturan yang dapat diberlakukan guna mencegah terjadinya krisis. Uni Eropa saat ini hanya mengandalkan pemberian bantuan dana talangan sementara kepada Yunani. Pemberian bantuan dana talangan dan bantuan finansial lainnya tidak menjamin Yunani dapat keluar dari krisis. Sebaliknya, pemberian bantuan dana talangan kepada Yunani mewajibkan Yunani untuk melakukan reformasi fiskalnya yang berdampak terhadap adanya protes atas kebijakan-kebijakan fiskal baru tersebut. Reformasi fiskal merupakan persyaratan yang diharus dipenuhi oleh Yunani atas bantuan finansial yang diterimanya dari IMF, ECB dan Komisi Eropa.

Uni Eropa harus mengorbankan satu dari tiga kebijakan ekonominya, yaitu pasal tanpa bailout. Hal ini bertujuan untuk memberikan bantuan dana talangan kepada Yunani agar krisis finansial di Yunani dapat segera diatasi serta mencegah dampak lanjutan dari krisis tersebut terhadap ekonomi Uni Eropa dan stabilitas Euro. Tidak hanya itu, Bank Sentral Eropa selaku lembaga moneter tertinggi di kawasan tersebut juga memberikan bantuan likuiditas kepada perbankan di Yunani agar sistem perbankan di Yunani dapat berjalan dengan baik selama masa krisis serta mencegah terjadinya *bank run*. Dalam hal ini, peneliti melihat bahwa Bank Sentral Eropa telah menjalankan fungsinya sebagai *lender of the last resort*. Secara keseluruhan, di satu

sisi upaya yang dilakukan oleh Uni Eropa untuk menanggulangi krisis finansial yang terjadi di Yunani berhasil mencegah Yunani dari kolaps. Hal ini juga dibuktikan dengan mulai kembalinya obligasi pemerintah Yunani ke pasar finanasial pada tahun 2014 Namun, di sisi lain pemberian bantuan ini justru mengakibatkan semakin tingginya utang pemerintah Yunani. Selain itu, pemberian bailout oleh Troika hanya mampu memulihkan sistem finansial Yunani, namun tidak berdampak terhadap perekonomian domestik Yunani secara keseluruhan.

5.2 Saran

a) Peneliti melihat bahwa perlunya ketegasan Uni Eropa dalam menindak negara anggotanya yang melanggar disiplin fiskal

b) Uni Eropa perlu menciptakan sinkronisasi kebijakan moneter dengan kebijakan fiskal untuk menciptakan integrasi ekonomi dan moneter yang sehat. Kebijakan moneter tunggal jangan hanya disesuaikan untuk kondisi perekonomian negara besar dengan kebijakan fiskal yang kuat, melainkan juga perlu menyesuaikan dengan kondisi perekonomian negara dengan kebijakan fiskal lemah seperti Yunani.

c) Uni Eropa dan negara-negara anggota Euro diharapkan untuk memperbaiki struktur ekonominya. Peneliti melihat bahwa ketika krisis, Uni Eropa belum mempunyai kebijakan pencegahan krisis. Kebijakan pencegahan krisis tentunya apabila dapat diterapkan akan mampu meminimalisir dampak negatif dari krisis yang terjadi.